

Pengembangan Wisata Halal Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah

Mei Sari¹, Moh. Bahrudin², Gustika Nurmalia³, Mutiasari Nurwulan⁴
UIN Raden Intan Lampung¹²³, Universitas Lampung⁴
gustikanurmalia@radenintan.ac.id³ mutiasarinurwulan88@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dinas pariwisata dalam mengembangkan wisata halal di kabupaten pesisir barat, dan untuk mengetahui peran wisata halal dalam meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Barat. Hal demikian di dorong oleh banyaknya obyek wisata yang tersebar di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, melihat kenyataan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat melalui Dinas Pariwisata berperan serta dalam mengelola dan memasarkan obyek-obyek pariwisata serta memberikan keleluasan dan tanggung jawab kepada Dinas yang khusus menangani dan mengawasi masalah- masalah mengenai kepariwisataan yang berada di Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan semboyan Pesisir Barat “Negeri Para Sai Batin dan Para ulama” yang menerapkan nilai-nilai Islam dan berpegang teguh terhadap aturan Islam.

Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Kabupaten Pesisir Barat, dengan menggunakan pendekatan kualitatif artiya data yang dikumpulkan berasal dari lapanggan yang dikumpulkan menggunakan naskah wawancara.

Penelitian memperoleh hasil bahwa dalam upaya mengembangkan potensi wisata halal di Kabupaten Pesisir Barat oleh Dinas Pariwisata menggunakan jenis pengembangan pariwisata yang bersifat tipe terbuka, tipe terbuka ini mempunyai sifat spontan, pada umumnya ditandai dengan adanya hubungan intensif antara wisatawan dengan masyarakat sekitar. Pariwisata halal di Pesisir Barat memang belum mampu memberikan kontribusi yang besar dan dampak signifikan bagi perekonomian daerah karna belum tercantumnya pariwisata halal dalam peraturan daerah serta belum terjalin kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan Pesisir Barat sebagai pariwisata halal. Meskipun demikian pariwisata tetap memberikan retribusi pendapatan bagi daerah meskipun tidak terbilang besar nominal pertahunnya.

Keyword : Pariwisata Halal, Pengembangan Pariwisata, Perekonomian Daerah

PENDAHULUAN

Pariwisata di Indonesia seiring berjalannya waktu semakin berkembang, perkembangan tersebut dapat dilihat dari kondisi ekonomi syariah yang ada saat ini. Menurut Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pengembangan ekonomi syariah dapat dilihat mulai dari bidang industri fashion halal, busana muslim, makanan halal, farmasi, hingga sektor pariwisata. Dalam indutsri makanan misalnya,

Received : May, 2021

Occupation: UIN Raden Intan Lampung, Universitas Lampung

E-mail : gustikanurmalia@radenintan.ac.id³ mutiasarinurwulan88@gmail.com⁴

Indonesia memiliki tingkat konsumsi makanan halal terbesar di dunia hal tersebut membuat Indonesia masuk lima besar negara dengan konsumsi produk obat-obatan, kosmetik halal, serta busana muslim terbesar di dunia. Sedangkan dalam ekonomi pariwisata, Indonesia menduduki peringkat keempat dengan jumlah kunjungan turis terbanyak dari anggota OKI. Potensi sektor pariwisata ini masih sangat menjanjikan, potensi tersebut dapat dilihat dari data statistik yang menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 11,52 juta kunjungan, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 14,04 juta kunjungan. Adapun kunjungan wisatawan mancanegara tersebut berkontribusi terhadap penerimaan devisa sebesar Rp 176 triliun rupiah, dari target 2016 sebesar 172 triliun rupiah. Pada tahun 2017 penerimaan devisa sebesar Rp 202,13 triliun dari target yang ditetapkan Rp 182 triliun, peningkatan pencapaian devisa tersebut terjadi ketika devisa dari komoditi batubara dan migas cenderung mengalami penurunan Hal tersebut menempatkan pariwisata sebagai *backbone* perekonomian bangsa, Indonesia memiliki banyak keunggulan. Di tahun 2019 industri pariwisata diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar, sebesar USD 24 Miliar, sektor tersebut melampaui sektor migas, batubara dan minyak kelapa sawit (kemenpar, 2017).

Pariwisata syariah merupakan suatu tren baru dalam dunia pariwisata saat ini. Indonesia telah dikenal luas di dunia sebagai pariwisata halal terbaik di dunia atas kemenangannya dalam event “*The World Halal Travel Summit & Exhibition 2015*”. Indonesia berhasil mendapatkan tiga penghargaan sekaligus, meliputi; *World Best Family Friendly Hotel*, *World Best Halal Honeymoon Destination* dan *World Best Halal Tourism Destination*. Hal ini tentunya menjadi sebuah peluang besar yang memudahkan negara Indonesia untuk terus melakukan pengembangan pariwisata syariah dan industri jasa syariah, sehingga Indonesia dapat menanamkan bahwa pariwisata syariah identik dengan Negara Indonesia di dalam *mindset* pariwisata dunia.

Pengembangan wisata syariah bukanlah wisata eksklusif karna wisatawan non muslim juga dapat menikmati pelayanan yang beretika syariah. Wisata syariah bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah dan religi melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran, dan hotel yang menyediakan makanan yang halal dan tempat sholat. Produk dan jasa wisata, serta tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama seperti pariwisata umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Sementara konsep syariah sendiri telah dibekukan lewat fatwa dan persetujuan MUI, kearifan local memberikan cita rasa unik yang melekat pada daerah tujuan wisata. Keterlekatan dengan lokasi ini pada gilirannya akan memberikan ruang pada masyarakat dalam meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat setempat.

Pengembangan kegiatan pariwisata sangat diperlukan dalam rangka menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata dan bagaimana wisatawan membelanjakan uang sebanyak- banyaknya selama melakukan wisata. Makin lama wisatawan berada di suatu tempat wisata akan meningkatkan pengeluaran mereka, sehingga akan membangkitkan perusahaan jasa transportasi, hiburan, akomodasi, dan jasa lainnya. Pengembangan kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian budaya bangsa, dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam. Pengembangan disini bukan berarti merubah secara total, tetapi lebih berarti mengelola, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi satu daya tarik wisata. Oleh karena itu pengelolaan dan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki daerah juga dikelola oleh masing-masing daerah. Begitu juga halnya dengan Provinsi Lampung yang memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat (Lambar) sangat kaya dengan potensi alam, budaya dan pariwisata. Wisata bahari menjadi sektor unggulan, karena Kabupaten

Pesisir Barat memiliki banyak pantai dengan jenis ombak yang berkualitas internasional sehingga sering dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang suka berselancar. Selain wisata bahari, adapula objek wisata lainnya seperti wisata religi/budaya, ekowisata dan eventwisata. Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pariwisata bahari yang besar di Provinsi Lampung dengan panjang pantainya 210 km. Kabupaten Pesisir Barat mempunyai 51 objek wisata potensial baik sektor bahari, religi/budaya, ekowisata dan eventwisata yang tersebar di seluruh wilayah mulai dari Lemong, di bagian utara Kabupaten Pesisir Barat, hingga kawasan perbatasan bagian selatan yaitu Bengkunt Belimbing yang saat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

Jumlah Objek Wisata Alam di Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 51 objek wisata terdiri dari 12 objek wisata bahari, 2 objek ekowisata dan 3 pemandangan alam dan 1 agroforestry. Persebaran Objek Wisata di Kabupaten Pesisir Barat terbagi dalam 3 area. Area Pesisir bagian Tengah memiliki objek paling banyak yaitu terdapat 9 objek wisata alam. Sedangkan Area Pesisir Barat bagian Selatan memiliki objek wisata paling sedikit yaitu terdapat 3 objek wisata alam. Adapun Area Pesisir Barat bagian Utara terdapat 6 objek wisata alam. Area Pesisir Barat bagian Utara terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa dan Pulau Pisang. Merupakan area yang menempati bagian Utara Kabupaten Pesisir Barat yang berbatasan langsung Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat 6 objek wisata, yaitu Pantai Way Gegas dan Pugung di Kecamatan Lemong, Pantai Saung dan Kota Karang di Kecamatan Pesisir Utara, Pantai Tembakak di Kecamatan Karya Punggawa, dan Pulau Pisang yang merupakan sebuah kecamatan. Area Pesisir Barat bagian Tengah merupakan wilayah Pusat Pariwisata yang menjadi titik persinggahan awal bagi wisatawan sekaligus Pusat Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat. Area ini terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Way Krui, Pesisir Tengah, Krui Selatan dan Pesisir Selatan.

Terdapat 9 objek wisata, yaitu Bukit Selalaw, Pantai Labuhan Jukung, Way Redak dan Desa Wisata Pahmongan di Kecamatan Pesisir Tengah, Pantai Mandiri di Kecamatan Kruai Selatan, Pantai Tanjung Setia, Karang Nyimboch, Way Jambu, dan Melasti di Kecamatan Pesisir Selatan. Area Pesisir Barat bagian Selatan terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Ngambur, Bengkunt dan Bengkunt Belimbing. Terdapat 3 objek wisata, yaitu Penangkaran Penyu Muara Tembulih di Kecamatan Ngambur, Ekowisata Sukaraja Atas dan Resort Pemerihan di Kecamatan Bengkunt Belimbing. Jenis objek wisata alam yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat berupa wisata bahari, pemandangan alam, ekowisata dan agroforestry. Area Pesisir Barat bagian Utara terdapat 5 objek wisata bahari yaitu, Pantai Way Gegas, Pugung, Saung, Kota Karang, serta Tembakak dan 1 ekowisata Pulau Pisang.

Menurut data Dinas Pariwisata Pesisir Barat (Pesibar), sampai akhir 2018, kunjungan Wisman (Wisatawan Mancanegara) di Pesisir Barat tembus 37.945 orang sedangkan untuk wisatawan regionalnya berjumlah 128.338. Jumlah ini meningkat tajam, dari tahun sebelumnya kunjungan wisman 2017 hanya mencapai 31.341 orang sedangkan wisata regionalnya 104.456. Untuk tahun 2018, penyumbang terbanyak wisman berasal dari negara, Australia, Spanyol, Amerika Serikat, Selandia Baru, Thailand Dan Jepang.

Melihat animo dari wisatawan yang begitu besar maka pengembangan objek wisata pantai di Pesisir Barat ini seyogyanya diimbangi dengan pengelolaan yang maksimal oleh Pemerintah Daerah. Dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terdapat pembagian jelas, antara urusan yang bersifat wajib dan pilihan. Bahwasanya Pemerintah Daerah bewenang untuk mengelola kekayaan daerah yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik daerah yang bersangkutan. Potensi tersebut antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, serta pariwisata. Dalam hal ini, urusan pemerintahan yang bersifat

pilihan yang dapat dilaksanakan sesuai potensi dari Kabupaten Pesisir Barat adalah sektor pariwisata serta semboyan dari kabupaten Pesisir Barat adalah “*Negeri Sai Batin dan Para Ulama*” dimana mayoritas beragama islam dan berpegang teguh dengan syariat-syariat Islam. Dinas yang memiliki kewenangan menangani urusan pilihan daerah di Bidang Pariwisata adalah Dinas Pariwisata (Wardana, 2017).

Kabupaten Pesisir Barat membutuhkan suatu sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dengan cepat yaitu dengan mengembangkan sektor pariwisata karna sebagian besar masyarakat pesisir barat bekerja di sektor pertanian yang masih dikelola secara tradisional dan masih menggunakan teknologi sederhana. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang cukup dominan yang masih bisa dikembangkan dengan baik karna didukung oleh banyaknya objek dan daya tarik wisata di kabupaten Pesisir Barat yang dapat dikembangkan sampai pada skala nasional bahkan internasional.

Penelitian terkait wisata halal telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu seperti yang dilakukan oleh Rosadi (2011), Heriyanto (2008), Subarkah (2018) namun terdapat perbedaan pembahasan yang sangat signifikan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menganggap bahwa penting untuk mengetahui peran pemerintah terkait pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Pesisir Barat. Pengembangan tersebut tidak hanya dilihat melalui kelayakan potensi wisata yang dimiliki, akan tetapi terhadap bagaimana penerapan manajemen atau mekanisme pengelolaan yang ada saat ini dalam upaya mempersiapkan Pesisir Barat sebagai kawasan wisata yang bertaraf nasional yang berbasis syariah (pariwisata halal) dalam meningkatkan perekonomian daerah. Seluruh kebijakan pengembangan tersebut seyogyanya diimbangi dengan adanya upaya manajemen secara komprehensif, menyeluruh, dan terpadu serta merupakan konsensus bersama bagi semua komponen pembangunan yang ada.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai analisis pengembangan pariwisata halal oleh dinas

TEORI

I. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian atau upaya untuk mewujudkan keterpaduan atau kecocokan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam pengembangan sebuah objek wisata dibutuhkan adanya fasilitas yang berfungsi untuk pelengkap dan memenuhi berbagai kebutuhan wisatawan. Untuk membantu perkembangan pariwisata berdirilah sebuah organisasi yang bertujuan menjaga pembangunan pariwisata untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, kemakmuran, perdamaian, kesejahteraan, HAM tanpa membedakan ras, suku, etnis, kelamin, bahasa, agama yaitu Organisasi Pariwisata Dunia “*World Tourism Organization (WTO)*”. (Gromang, 2003) Kemudian, di Indonesia juga pemerintah menata rapi tentang istilah pariwisata dalam UU no.10 tahun 2009 tentang pariwisata yaitu „*berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah*”. Pengembangan kegiatan pariwisata di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua tipe pengembangan (berdasarkan pola, proses serta pengelolaanya), yaitu tipe tertutup (*enclave*) dan tipe terbuka (*spontaneous*) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pariwisata tipe tertutup, tipe ini memiliki karakteristik lokasinya terpisah dari masyarakat setempat dan tidak melibatkan masyarakat sekitarnya. Sehingga kontribusi untuk daerah sekitar sangat kurang.
- b. Pariwisata tipe terbuka, tipe ini mempunyai sifat spontan pada umumnya ditandai dengan adanya hubungan intensif antara wisatawan dengan masyarakat sekitar. Sehingga distribusi pendapatan yang diperoleh dari wisatawan dapat secara langsung dinikmati oleh penduduk lokal. Hal ini

dapat dilihat dari partisipasi masyarakat lokal terhadap pengembangan fasilitas obyek wisata setempat dampak negatif yang dimiliki akan cepat menjalar kedalam penduduk lokal sehingga sulit untuk diantisipasi. (Hadiwijoyo, 2012)

Gamal Suwanto mengklasifikasikan mengenai pola kebijakan pengembangan pariwisata yang meliputi:

- 1) Kebijakan umum
- 2) Arah pola kebijaksanaan pengembangan jalur wisatawan
- 3) Pola kebijakan pengembangan obyek wisata
- 4) Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana
- 5) Kebijakan pengembangan kelembagaan
- 6) Kebijakan pengembangan industri

2. Konsep Pariwisata Halal

Pariwisata halal mengacu pada penyediaan produk dan layanan kepariwisataan yang memenuhi kebutuhan pelacang muslim untuk memfasilitasi ibadah dan kebutuhan makanan yang sesuai dengan ajaran islam. Pariwisata halal merupakan jenis wisata yang manganut nilai-nilai islam, dan dalam perbandingan itu bisa dibuat dengan pertumbuhan Islam. Bond and Hussain mengemukakan bahwa pariwisata halal merupakan subtype dari wisata religi dimana jenis pariwisata ini dilakukan oleh para pengikut Islam yang menjalani kehidupan berdasarkan pada hukum syariah. Sehingga sesuatu hal dapat digolongkan halal jika telah berpedoman pada kaidah islam.

Karakteristik Wisata halal:

- a. Destinasi yang aman dan ramah untuk aktivitas liburan keluarga terutama keluarga muslim.
- b. Fasilitas dan pelayanan yang ramah muslim terutama di kehalalan makanan, fasilitas sholat, fasilitas bandara, dan pilihan akomodasi.
- c. Pemasaran dan kesadaran destinasi tentang wisata halal seperti

kemudahan berkomunikasi, kesadaran kebutuhan wisatawan muslim dan usaha untuk memenuhinya, transportasi udara, dan persyaratan visa.

Panduan umum wisata syariah mengatur beberapa panduan dalam mengaplikasikan wisata syariah, yang meliputi destinasi, akomodasi, biro perjalanan wisata dan pramuwisat, usaha penerbangan dan juga tempat perbelanjaan dan persinggahan. (Widagyo, 2015)

3. Perekonomian Daerah

Kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan suatu pembangunan meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Ada tiga macam ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output, pertumbuhan output pekerja, dan pertumbuhan output per kapita. Pertumbuhan output digunakan untuk menilai kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh peningkatan tenaga kerja dan modal di wilayah tersebut. Pertumbuhan output per tenaga kerja sering digunakan sebagai indikator adanya perubahan daya saing wilayah tersebut (melalui pertumbuhan produktivitas). Sedangkan pertumbuhan output perkapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi. (Widada *et. Al*, 2014)

b. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan besaran yang mencerminkan perekonomian daerah besaran ini bisa dipandang dari sisi penyediaan, PDRB merupakan total nilai tambah dari seluruh aktivitas ekonomi menghasilkan barang dan jasa disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Data tersebut dikategorikan disajikan menurut lapangan usaha dan dimanfaatkan untuk mengukur tingkat perekonomian dan struktur ekonomi suatu wilayah serta pendapatan perkapita penduduk. Indikator ini memberikan gambaran mengenai potensi sekaligus kemampuan wilayah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki.

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang dapat dipungut sendiri dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada daerah bersangkutan. Komponen PAD tersebut mencakup unsur Pajak Daerah, Retribusi Daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan lain yang sah. Termasuk dalam pajak ini adalah pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lainnya yang dipungut sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Tetapi retribusi daerah hanya dapat dipungut bilamana daerah memberikan jasa pelayanan tertentu kepada masyarakat. Besar kecilnya PAD yang diterima oleh suatu kota akan sangat ditentukan oleh dua hal yaitu potensi penerimaan daya tarif pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) setempat. Potensi PAD sangat ditentukan dengan perkembangan jumlah, ukuran dan kualitas objek pajak bersangkutan. Sedangkan tarif pajak oleh pemerintah daerah setempat dengan memerlukan perkembangan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan wajib pajak yang terdapat pada kota yang bersangkutan. Memerhatikan jenis pajak yang merupakan sumber utama penerimaan PAD tersebut, terlihat disini bahwa besar kecilnya penerimaan PAD akan sangat ditentukan oleh perkembangan kegiatan perekonomian daerah bersangkutan.

Berdasarkan pasal 1 angka 10 UU No 10.28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi antara badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan

masyarakat. (Yani, 2008)

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD antara lain:

- 1) Banyaknya sumber pendapatan di Kabupaten/Kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB).
- 2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah.
- 3) Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.
- 4) Adanya kebocoran-kebocoran.
- 5) Biaya pungut yang masih tinggi.

METODOLOGI PENELITIAN

I. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kasus dan penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit social, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat (Narbuko dan Ahmad, 2012). Penelitian *field research* dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian berkenaan dengan analisis pengembangan pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian daerah di dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. Selain menggunakan *field Research* peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang lingkup kepustakaan (Sutrisno, 2002).

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu suatu penelitian yang memaparkan dan melaporkan suatu keadaan objek gejala kebiasaan

kemudian di analisis dengan kritis. Penelitian diskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu.

Adapun analisis data yang dilakukan peneliti yaitu melalui pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari lapangan yang dikumpulkan menggunakan naskah wawancara

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Dinas pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada penelitian yaitu dinas pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dan untuk peneliti juga melakukan observasi langsung ke lokasi-lokasi pariwisata yang ada di Pesisir Barat guna melengkapi data sebagai bahan analisis.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumen, maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara melihat, mendengar, mengamati dan merasakan hal-hal yang berkaitan dengan model pengembangan pariwisata halal pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian Pesisir Barat untuk dijadikan sebuah data berdasarkan gagasan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi.

b. Wawancara (interview)

Penulis mewawancarai pegawai dinas pariwisata kabupaten Pesisir Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan dengan surat kabar, majalah, buku tertulis dari objek penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh khususnya yang berkaitan dengan data tentang implementasi model pengembangan pariwisata halal pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian Pesisir Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengembangan Wisata Halal oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ismail selaku sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat bahwa dalam upaya mengembangkan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat menjadi wisata halal adalah sebagai berikut:

a. Mengelompokkan jenis-jenis wisata yang ada di Pesisir Barat.

1) Wisata budaya

a) Menenun tapis, salah satu tradisi unik yang dilakukan oleh penduduk setempat adalah menenun kain tapis yaitu tradisi marga Way Sindi mengharuskan warganya menenun kain tapis dari benang emas. Kain tenun yang bermotif gajah atau perahu ini bisa juga menjadi salah satu sektor industri rumah tangga yang bisa meningkatkan pendapatan bagi penduduk dan bagi pendapatan daerah Kab. Pesisir Barat karna banyak sekali wisatawan yang berkunjung hanya ingin mengetahui cara pembuatan tapis dan membeli kain tenun tersebut.

b) Kekiceran, adalah adat budaya lampung yang masih dilestarikan di marga / warga Pugung, Pesisir Barat, Krui,

Lampung Indonesia. Kekiceran ini dilakukan oleh masyarakat pugung untuk merayakan kemenangan setelah melakukan puasa selama sebulan penuh selama bulan Ramadhan, dimulainya festival kekiceran mulai tanggal 1 syawal sampai 10 syawal.

2) Wisata Bahari

Wisata yang dikelola pemerintah daerah salah satunya adalah wisata bahari yang memiliki potensi yang paling besar untuk kabupaten pesisir Barat. Di pesisir barat terdapat banyak wisata bahari yang cukup dikenal bahkan sampai mancanegara untuk berselancar karna spot ombaknya yg besar sehingga banyak turis mancanegara yang berkunjung hanya untuk menikmati berselancar di laut Pesisir Barat.

Wisata bahari yang banyak dikenal di pesisir barat adalah pantai labuhan jukung, pantai tanjung setia dan pulau pisang.

3) Wisata Religi

Di Kab. Pesisir Barat terdapat dua wisata religi yang cukup dikenal dimasyarakat karna nuansa mistisnya yaitu Goa Matu yang terletak di kecamatan Karya Penggawa dan Keramat Menula atau makam Gajah Mada yang terletak di kecamatan Pesisir Utara. Wisata religi goa matu memang belum seberapa besar memberikan kontribusi dalam pendapatan daerah karna masih dalam tahap pengembangan dan sampai saat ini oleh pemerintah daerah masih terus melakukan perbaikan akses jalan menuju goa matu sehingga bisa mejadikan goa matu salah satu destinasi wisata halal yang berbasi religi dan memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah untuk ke depannya.

b. Mengembangkan kawasan jasa industri pariwisata seperti hotel,

rumah makan, cafe dan pusat oleh-oleh.

Pemerintah saat ini selain mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur yang ada di daerah destinasi wisata juga fokus pengembangan dengan meningkatkan industri jasa perhotelan, rumah makan, cafe dan pusat oleh-oleh karna hal tersebut merupakan penyokong utama peningkatan kontribusi dari sektor pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dan menjadi salah satu peluang bisnis masyarakat dari sektor industri pariwisata. Dari sektor hotel misalnya para wisatawan lokal maupun mancanegara tentu saja memerlukan tempat penginapan sementara apabila mereka datang dari luar daerah kabupaten pesisir barat.

Terutama sistem palayanan hotel yang berbasis syariah, hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *front office*, perlengkapan *istinja* di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di *reception policy and procedure*, *house rules*, harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah. Begitu pun dari sektor rumah makan, cafe dan pusat oleh-oleh para wisatawan pasti membutuhkan konsumsi selama berada ditempat wisata dan membawa oleh-oleh khas dari daerah wisata tersebut itulah sehingga upaya yg dilakukan dinas pariwisata dan pemerintah daerah adalah mendorong masyarakat untuk mendirikan usaha di sekitaran destinasi wisata demi memenuhi kebutuhan para wisatawan baik dari makanan khas Krui yang baik dan halal dan berbagai macam sovenir yang dibuat langsung oleh masyarakat Pesisir Barat.

c. Memenuhi kebutuhan jaringan sarana dan prasarana pada kawasan wisata

Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mendukung kelancaran pariwisata. Sarana dan prasarana tidak semuanya disediakan oleh pemerintah, akan tetap disediakan oleh pengelola obyek wisata itu sendiri, misalnya pada kawasan wisata labuhan jukung untuk rumah makan dan cafe dinas pariwisata hanya memberi izin dan memberikan tempat untuk masyarakat mendirikan usaha dengan timbal balik membayar pajak kepada daerah. Contoh yang lain adalah gua batu pemerintah daerah hanya memberikan arahan dan dana untuk perbaikan sarana dan prasarana wisata religi tersebut lalu dikelola oleh masyarakat yang dikenal dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Hasil wawancara penulis dengan bapak Eko sebagai Kasi Akomodasi dinas pariwisata bahwa untuk menjadikan pariwisata pesisir barat sebagai pariwisata halal maka harus memulai dari itikad pemerintahnya itu sendiri yaitu dengan mensosialisaikan ke masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar untuk berusaha mendapatkan sertifikasi halal dari MUI untuk hotel dan restoran terlebih dahulu dengan demikian akan menjadi salah satu acuan untuk menjadikan Pesisir Barat sebagai salah satu pariwisata halal yang ada di Lampung.

d. Mengembangkan industri kreatif dan mempromosikan wisata - wisata yang ada di pesisir barat melalui even tahunan

Pemerintah daerah dan dinas pariwisata kabupaten pesisir barat dalam upaya mengembangkan potensi pariwisata halal di Kabupaten Pesisir Barat dinas pariwisata menggunakan jenis pengembangan pariwisata yang bersifat Pariwisata tipe terbuka, dengan melibatkan masyarakat sekitar secara langsung dan mempunyai sifat spontan pada umumnya ditandai dengan adanya hubungan intensif antara wisatawan dengan masyarakat sekitar.

Dengan diperbolehkannya mendirikan berbagai usaha disekitaran wisata

pantai Sehingga distribusi pendapatan yang diperoleh dari wisatawan dapat Secara langsung dinikmati oleh penduduk lokal.

Sedangkan strategi yang digunakan oleh dinas pariwisata dan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata halal adalah strategi *Attraction* yaitu memperkuat daya tarik wisata berbasis budaya dan pusaka (*culture and heritage*) teknologi untuk *smart city* dan industri kreatif untuk kota kreatif dengan memperkuat basis sumber daya alam, budaya, dan komunitas. Dapat dikatakan tidak semua terlaksana dengan baik dan maksimal. Meskipun kita ketahui bahwa manfaat kepariwisataan merupakan kegiatan pemakaian jasa yang beranekaragam salah satunya industri kreatif yang terkenal adalah tapis menurut hasil wawancara penulis dengan bapak ismail selaku sekretaris dinas pariwisata kabupaten pesisir barat beliau mengatakan bahwa tapis merupakan salah satu industri kreatif asli dari pulau pisang salah satu kecamatan yang ada di pesisir barat dan industri ini dikaitkan dengan menyelaraskan kehidupan baik terhadap lingkungan maupun kepada yang pencipta alam semesta.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan industri kreatif ini adalah dilakukan pada saat kegiatan pameran rutin festival teluk stabas, dan atraksi seni tanggal dibentuknya Kabupaten Pesisir Barat. Kedua kegiatan ini biasanya dilakukan satu tahun sekali dengan adanya pameran ini diharapkan semakin terkenalnya industri - industri kreatif dan pariwisata yang ada sehingga akan memberikan dampak pada perekonomian daerah Pesisir Barat itu sendiri.

Kendala atau permasalahan yang sering timbul dari pengembangan pariwisata menurut dinas pariwisata yaitu:

- 1) Belum tercantumnya dalam peraturan daerah Kabupaten pesisir Barat untuk pariwisata pesisir barat sebagai pariwisata halal meskipun dari semboyan kabupaten Pesisir Barat itu sendiri melambangkan sebagai pariwisata halal.
- 2) Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dibidang pariwisata halal baik dari kuantitas ataupun kualitas yang memiliki daya saing tinggi. Hal ini menyebabkan pariwisata halal di Pesisir Barat sulit berkembang karna pengelola yang kurang pengetahuan tentang pariwisata halal itu sendiri.
- 3) Masih rendahnya aksesibilitas dan kulaitas destinasi wisata halal serta belum tersedianya transportasi umum yang menuju objek wisata halal ini menyebabkan kesulitan bagi para wisatawan yang datang maupun bagi para pelaku usaha.

2. Peran Pariwisata Halal dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Kabupaten Pesisir Barat

Wisata halal adalah suatu produk baru dari pasar muslim dan non- muslim. Di dalam Al- Qur'an Allah SWT menyuarakan pada umatnya untuk melakukan perjalanan atau travelling hal ini bertujuan agar umatnya selalu senantiasa bersyukur atas kelimpahan rezeki di bumi. Wisata halal dapat dipahami sebagai nilai-nilai ajaran islam yang diimplementasikan sebagai landasan dalam melakukan perjalanan wisata tanpa mendiskriminasikan wisata non-muslim.

Keberadaan pariwisata syariah dapat menyokong pertumbuhan ekonomi dengan menghidupkan indutri kreatif masyarakat. Salah satu sumber pendapatan daerah merupakan dari sektor pariwisata. Semakin meningkatnya pengunjung wisatawan ke daerah wisata tersebut akan berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah tersebut melalui retribusi cottage, GSG, dan retribusi masuk kawasan wisata yang ada didaerah wisata

tersebut. Keberhasilan suatu pariwisata suatu daerah sangat tergantung pada jumlah wisatawan ke daerah tersebut.

Tabel I

Retribusi pendapatan pariwisata halal yang dikelola Pemerintah Daerah

No	Tahun	Pendapatan
1	2016	47.350.000
2	2017	59.850.000
3	2018	94.037.000
4	2019	85.694.0000

Sumber: Dinas Pariwisata Pesisir Barat Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui jumlah retribusi yang dihasilkan daerah dari retribusi pariwisata yang di Pesisir Barat yang paling besar memberikan kontribusi adalah *cottage* atau penginapan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang setiap tahunnya meningkat. Sedangkan retribusi dari masuk ke kawasan wisata belum sepenuhnya ditarik kepada pengunjung karna pengunjung hanya membayar saat hari-hari besar saja seperti hara raya idul fitri, dan tahun baru saja sehingga retribusi yang didapat belum memberikan kontribusi yang besar bagi daerah kabupaten Pesisir Barat. ada dua hal yang membangun pariwisata berhubungan dengan perekonomian daerah yaitu:

- a. Pariwisata berdampak pada ekonomi karna dapat menciptakan lapangan kerja, berpengaruh terhadap pendapatan, neraca

pembayaran, penerimaan devisa dari beberapa hal seperti belanja wisatawan, pembangunan pariwisata, impor maupun ekspor barang dan lain-lain.

- b. Pariwisata merupakan kegiatan yang membutuhkan jasa beraneka ragam sehingga para wisatawan memerlukan jasa hotel, jasa makan / minum, jasa angkutan, dan lain-lain.

Saat ini sektor pariwisata halal di Pesisir Barat memang belum mampu memberikan kontribusi yang besar dan dampak signifikan bagi perekonomian daerah karna belum tercantumnya pariwisata halal dalam peraturan daerah serta belum terjalin kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan Pesisir Barat sebagai pariwisata halal. Akan tetapi meskipun demikian pariwisata tetap memberikan retribusi pendapatan bagi daerah meskipun tidak terbilang besar nominal pendapatan retribusi dalam waktu pertahunnya, pemerintah Pesisir Barat dengan segala usaha yang sedang dilakukan dengan baik sehingga harapannya pariwisata Pesisir Barat mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah terutama sektor pariwisata halal.

KESIMPULAN

Dinas pariwisata kabupaten Pesisir Barat dalam upaya mengembangkan potensi wisata halal di Kabupaten Pesisir Barat menggunakan jenis pengembangan pariwisata yang bersifat tipe terbuka, dengan melibatkan masyarakat sekitar secara langsung dan mempunyai sifat spontan, pada umumnya ditandai dengan adanya hubungan intensif antara wisatawan dengan masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat di pertegas dengan diperbolehkannya mendirikan berbagai usaha disekitar wisata pantai Sehingga distribusi pendapatan yang diperoleh dari wisatawan dapat secara langsung dinikmati oleh penduduk lokal. Pengembangan pariwisata halal di kabupaten peisisir Barat lainnya yaitu melalui program memperbaiki sarana dan prasarana, sehingga nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang akan meningkatkan

Received : May, 2021

Occupation: UIN Raden Intan Lampung, Universitas Lampung

E-mail : gustikanurmalia@radenintan.ac.id³ mutiasarinurwulan88@gmail.com⁴

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Abu dan Narbuko Cholid, *metodologi penelitian*, cet 12, Jakarta: Bumi aksara, 2012.
- Al Et Chookaew : *Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country*.
- Arifin Johssar : *Wawasan Al-qur'an dan Sunnah Tentang pariwisata*, dalam Jurnal An Nur Nomor 2, Vol. 4, 2015.
- Amerta Suniasta Made I, *Pengembangan Pariwisata Alternatif*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka 2019
- Andayani Fitria dan Sucipto Hery, *Wisata Syariah, Karakter, Potensi Prospek dan Tantangannya*, Jakarta: Grafindo Books Media dan Wisata Syariah Consulting, 2014.
- A.j Muljadi, *Kepariwisata dan perjalanan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.
- Cayaray Sarliaji : *Model Layanan Perpustakaan Daerah luar biasa*, Reposi. Upi Edu Universitas Pendidikan Indonesia, 2014.
- Djakfar Muhammad, *Pariwisata Halal Perspektif Multidemensi Peta Jalan menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*, Malang : UIN Maliki Press, 2017.
- Eko Nugroho, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Faidullah Endy Muhammad, Mahmud Amir M, *Mimpi Wisata Syariah Studi Atas Peaksanaan Wisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi*, Banyuwangi : LPM Institut Agama Islam Ibrohim Genteng Banyuwangi, Januari 2018
- Gromang Frans, *Tuntunan Keselamatan dan Keananan Wisatawan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Isdarmanto, *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*,

Yogyakarta: Gerbang Media Aksara dan Stipram, 2017

James j. Spillane, *ekonomi pariwisata sejarah dan prospeknya*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Kartono Kartini, *pengantar metodologi riset sosial*, Bandung, Mundur Maju. Majid Abdul, *Perencanaan Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cet ke IV, Jakarta: Rhineka Cipta, 2004.

Muani, *Kebudayaan dan Pariwisata*, Yogyakarta : Garudhawaca, 2018.

Nanda Rahmi, kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Kota Banda Aceh, jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, Vol 8, No.01, januari 2017.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Qhardawi Yusuf, *Fiqih Zakah Muarsasat Ar-risalah*, Bairut Libanan, Cet II I408H/1998 terjemahan Didin Hafifudin.

Rendayani Mentari, *Analysis Potential and Strategy Development of Puncak Mas Sukadanaham bandar lampung*, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018

Roman Arif : *Peran Kelompok Sadar Wisata Terhadap Perkembangan Pariwisata Pantai Baron dan Pindul*, *Skripsi*, Yogyakarta, Sosial dan Humanior Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Saud Abu Mahmud, GBEI, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 19.

Sofyan Riyanto : *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, Cet ke 26, Bandung, Alfabeta CV, 2017.

Jafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014. Spillane J.

James, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prosepeknya*, Yogyakarta: Kansius, 2001

Supriadi Dedi, *Wibowo Sukarno, Ekonomi Mikro Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.

Suprayitno Eko, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Surya D, *Provinsi di Indonesia*, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.

Sutrisno Hadi , *Metode Research*, UGM, Yogyakarta 2002.

Tika, Pabundu Moh *Metode Risert Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Thiptoherijanto Prijono, *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat.

Wardana: *potensi dan strategi perkembangan pariwisata kabupaten pesisir barat, Lampung*, fakultas ilmu sosial dan politik universitas lampung, 2017.